



## Analisis kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh

## Policy for improving effectiveness of funding assistance Business Retail Development (BRD) for fishermen community in Banda Aceh

Elfa Yeni, Agus Naufal

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude, Aceh Besar 23372, Provinsi Aceh; Email korespondensi: elfayeni007@gmail.com

**Abstract.** *The objective of the study was to analyze the policy of increasing the effectiveness of providing PUMP funds to fishermen groups in Kota Banda Aceh. Mina Rural Business Development Program (PUMP) was one of the models developed by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to overcome poverty for coastal communities. From the previous research data, it was known that PUMP funding is considered ineffective because there were still many people who did not benefit from this PUMP fund and the improper use of PUMP funds targeted by beneficiary communities. To improve the effectiveness of PUMP funding, it was necessary to do in the policy analysis on the effectiveness of this PUMP fund. Analysis Hierarchy process (AHP) was used to look at the policies to be used for the effectiveness of PUMP grants. The method of collecting data was the interview or deep interview with policymakers in DKP Aceh Province, with NGOs and academics in Banda Aceh. The Results of Analysis Hierarchy process shows the criteria that mainly influence the increasing effectiveness of PUMP funding assistance to the fishermen economy are human resources, followed by time and human resources. While the policy priority of increasing the effectiveness of PUMP funding to the fishermen economy is to increase the capacity of the fishermen's supervisor, followed by management financial training of fishermen and intensively monitoring post-aid activities.*

**Keywords:** *policy analysis, effectiveness, poverty, group of fishermen, PUMP*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh. Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) merupakan salah satu model yang dikembangkan oleh Dirjen Perikanan Kelautan (DKP) untuk menggurangi kemiskinan bagi masyarakat pesisir. Dari data penelitian sebelumnya, diketahui bahwa bantuan dana PUMP ini dinilai tidak efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh manfaat dari dana PUMP ini dan penggunaan dana PUMP yang tidak tepat sasaran oleh masyarakat penerima bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas pemberian dana PUMP tersebut maka perlu dilakukan di analisa kebijakan tentang efektivitas pemberian dana PUMP ini. Analisis Hirarki Proses digunakan untuk melihat kebijakan yang akan digunakan untuk efektivitas pemberian dana PUMP. Metode pengambilan data adalah wawancara atau deep interview dengan pengambil kebijakan yang ada di DKP Provinsi Aceh, dengan LSM yang ada di banda Aceh serta dengan pihak akademisi yang ada di Banda Aceh. Hasil yang didapat adalah Hasil Analisis Hirarki Proses menunjukkan kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah kriteria sumberdaya manusia, kriteria waktu dan kriteria SDM. Sedangkan prioritas kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah peningkatan kapasitas tenaga pembimbing diurutan pertama, diikuti pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan dan pemantauan secara intensif kegiatan pasca



penyaluran bantuan. Sedangkan kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah kriteria sumberdaya manusia, kriteria waktu dan kriteria SDM.

**Kata kunci:** analisis kebijakan, efektivitas, kemiskinan, kelompok nelayan, PUMP

## **Pendahuluan**

Propinsi Aceh memiliki panjang wilayah pesisir lebih kurang 1.660 km dengan luas perairan laut 295.370 km<sup>2</sup>, terdiri atas luas wilayah perairan (territorial dan kepulauan) seluas 56.563 km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 238.807 km<sup>2</sup> dan diapit oleh tiga perairan laut utama dunia yaitu Samudera Hindia, Laut Andaman dan Selat Malaka sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap sumberdaya perikanan (Herdiana *et al.*, 2010).

Kemiskinan dan keterbelakangan masih merupakan isu pembangunan ekonomi di Aceh. Kantong-kantong kemiskinan umumnya dijumpai di kawasan pesisir (Muchlisin *et al.*, 2012a; Muchlisin *et al.*, 2012b). Setelah masa konflik dan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh di akhir tahun 2004, persoalan kemiskinan masih harus menjadi prioritas penting bagi Pemerintah Aceh. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Aceh tahun 2014 sebesar 881 juta jiwa atau 20,98 persen dari total penduduk Aceh. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 1,1 juta jiwa atau sebesar 26,65 persen dari total penduduk Aceh. Upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kemiskinan di Aceh telah memberikan perbaikan pada disparitas pendapatan. Jika dilihat dari indikasi ketimpangan distribusi pendapatan pada kelompok miskin di Aceh, distribusi pendapatan di kelompok miskin di Aceh masih lebih baik dari angka nasional. Namun, upaya tersebut masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan karena secara kualitas, ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM), angka IPM Aceh 68,81 pada tahun 2014, masih dibawah IPM nasional yaitu 68,90 (BPS,2014). Untuk itu, penting bagi Pemerintah Aceh untuk mengetahui kondisi aktual dari masyarakat miskin, mempelajari akar persoalan kemiskinan di Aceh dan mengupayakan perbaikan-perbaikan kebijakan pro-poor yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh).

Bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi bagi masyarakat pesisir dirasa masih penting dalam upaya memperkecil kesenjangan ekonomi dan meningkatkan produktifitas masyarakat pesisir (Muchlisin *et al.*, 2012c; Muchlisin *et al.*, 2013). Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) merupakan salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Program ini berjalan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta dukungan penuh dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Sekarang program PUMP telah dilaksanakan di 247 Kabupaten/Kota. Program PUMP diadakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) (KKP, 2014)

Program PUMP di Kota Banda Aceh sudah berjalan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat pesisir terutama para nelayan yang belum mendapat manfaat dari program tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2017) didapatkan hasil bahwa pemberian bantuan dana kepada masyarakat tidak efektif karena menggunakan dana yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang analisis kebijakan peningkatan efektivitas pemberian dana PUMP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebijakan mana yang akan dipilih untuk meningkatkan efektivitas pemberian dana PUMP.



**Bahan dan Metode**

**Waktu dan tempat**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (case study) dilaksanakan di Kecamatan Syiah Kuala, yaitu di Desa Alue Naga dan Desa Deah Raya kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh pada tanggal April 2017 hingga Agustus 2017. Dalam penelitian ini yang dimaksud kasus adalah kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Menurut Maxfield (1930) dalam Nazir (2009), studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

**Pengambilan sampel**

Pengambilan data dilakukan secara *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diambil adalah 3 orang pakar yang paham tentang penyaluran dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di Banda Aceh. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui dua tahap wawancara yang meliputi data alternatif pilihan pakar terhadap kriteria-kriteria yang ada, dan data pilihan kriteria-kriteria terhadap tujuan yang ingin dicapai. Wawancara tahap pertama dengan pakar dilakukan untuk menentukan serta memvalidasi kriteria dan alternatif dalam peningkatan efektivitas pemberian dana PUMP yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan keusioner. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dinas Perikanan Kelautan perikanan Provinsi Aceh dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pada penelitian ini dilakukan pula deep interview dengan pejabat berwenang yang ada di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh, LSM yang ada di kota Banda Aceh dan Pihak Akademisi yang ada di banda Aceh untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dilapangan.

**Analisis data**

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, ditabulasikan serta dianalisis dengan menggunakan analisis Analisis Hirarki Proses (AHP). Analisa data dilakukan dengan analisa data Deskriptif, Kualitatif yaitu berupa uraian terperinci tentang hasil persepsi para pakar yang dikuantifikasikan dengan skala Saaty berisi penggambaran pola-pola klasifikasi/kategorisasi untuk mempertimbangkan tanggapan/pandangan atau opini/tanggapan informan, maupun hasil pengamatan peneliti di lapangan. Menurut Chang (1996), langkah utama metode AHP adalah menentukan tingkat kepentingan relatif pada tiap-tiap pasang faktor pada hirarki yang sama dengan metode perbandingan berpasangan. Skala penilaian berpasangan Saaty dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala penilaian perbandingan

Nilai Perbandingan (A dibandingkan B)	Definisi
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen yang lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai diantara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Sumber: Saaty (1988) dalam Rukmayadi dan Marimin (2000)

### Analisis hirarki proses (AHP)

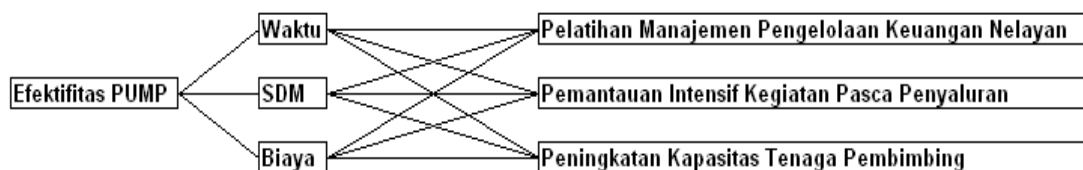
AHP adalah model pengambil keputusan yang dapat menolong kita dalam pengambilan keputusan yang sulit (Saaty, 1988). Analisis ini digunakan pada pengambilan keputusan yang memiliki banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya, dan penentuan prioritas dari strategi yang dimiliki dalam situasi konflik (Saaty, 1993) dalam Marimin (2010). Menurut Kaleka (2007), tahapan analisis dalam AHP adalah mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang ingin dicapai dan selanjutnya penyusunan struktur hirarki yang dimulai dari tujuan umum (Level 1), dilanjutkan dengan sub tujuan/kriteria (level 2), dan kemungkinan alternatif pada tingkat kriteria paling bawah (level 3). Selanjutnya penelitian ini akan mencari pilihan alternatif kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP pada kelompok nelayan di Banda Aceh.

Adapun fokus, kriteria, dan alternatif pilihannya adalah sebagai berikut:

- Fokus : Pemilihan alternatif kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh
- Kriteria : 1. Waktu  
2. SDM  
3. Biaya
- Alternatif : 1. Pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan  
2. pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan  
3. peningkatan kapasitas tenaga pembimbing

### Hasil

Fokus utama dalam penentuan urutan prioritas kebijakan yang merupakan tujuan umum yang ingin dicapai adalah kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan yang merupakan level pertama pada hirarki (level 1). Selanjutnya disusun terlebih dahulu level terakhir dari hirarki (level 3) yang merupakan pilihan alternatif kebijakan yang dinilai paling sesuai dengan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan menurut pendapat pakar-pakar perikanan di lokasi penelitian.



Gambar 1. Hirarki Pemilihan Alternatif Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pemberian Bantuan Dana PUMP Terhadap Perekonomian Nelayan

Alternatif-alternatif kebijakan tersebut meliputi pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan, pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan, dan peningkatan kapasitas tenaga pembimbing. Selanjutnya, dari hasil alternatif-alternatif yang telah dipilih disusun kriteria-kriteria pokok pada level 2 (Gambar 1). Kriteria-kriteria tersebut disusun berdasarkan hasil wawancara dengan para pakar perikanan sesuai dengan aspek waktu, sumberdaya manusia, dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan alternatif-alternatif kegiatan yang akan dipilih. Hirarki kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan dapat dilihat pada Gambar 2.



**Inconsistency = 0.00**  
**with 0 missing judgments.**

Gambar 2. Hasil Penilaian AHP pemilihan Kriteria yang Paling Berpengaruh pada Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pemberian Bantuan Dana PUMP Terhadap Perekonomian Nelayan

Kriteria sumberdaya manusia merupakan kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan dengan skor 0,582 (Gambar 2). Prioritas kriteria selanjutnya adalah kriteria waktu, kriteria waktu dianggap penting karena semakin cepat kegiatan-kegiatan dapat diselenggarakan dan dalam waktu yang singkat, semakin cepat pula dampak yang akan dirasakan sehingga akan menjadi semakin efektif (Gambar 3). Pada kriteria waktu, alternatif pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan diurutan pertama, diikuti peningkatan kapasitas tenaga pembimbing, dan pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan. Hal ini terjadi karena para pakar menganggap pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang paling sedikit.

Pada kriteria biaya dan SDM, prioritas utama adalah peningkatan kapasitas tenaga pembimbing, diikuti pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan dan pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan (Gambar 4). Hal ini terjadi karena para pakar menganggap peningkatan kapasitas tenaga pembimbing membutuhkan biaya yang paling sedikit dan kebutuhan SDM lebih mudah dipenuhi. Hal ini terjadi karena para pakar menganggap dengan meningkatnya kapasitas pembimbing maka manajemen pengelolaan keuangan nelayan akan meningkat pula sehingga pemantauan pasca penyaluran dana bantuan akan lebih mudah dipantau.

Overall Inconsistency = .00



Gambar 3. Hasil Penilaian AHP pemilihan alternatif yang Paling Berpengaruh pada Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pemberian Bantuan Dana PUMP Terhadap Perekonomian Nelayan Menurut Kriteria Waktu

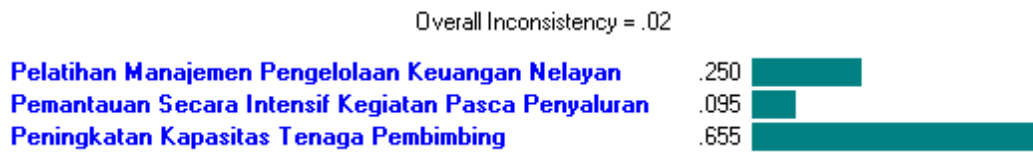
Overall Inconsistency = .01



Gambar 4. Hasil Penilaian AHP pemilihan alternatif yang Paling Berpengaruh pada Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pemberian Bantuan Dana PUMP Terhadap Perekonomian Nelayan Menurut Kriteria SDM



Sedangkan kriteria biaya merupakan prioritas terakhir (Gambar 5), karena biaya-biaya tersebut bersumber dari pemerintah. Biaya-biaya yang akan berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat banyak akan lebih mudah cair asalkan sudah dianggarkan sebelumnya. Prioritas kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan berdasarkan hasil penilaian *Analytical Hierarchy Process (AHP)* menunjukkan peningkatan kapasitas tenaga pembimbing di urutan pertama dengan skor 0,490, diikuti pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan 0,411 dan pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran 0,099 (Gambar 6).



Gambar 5. Hasil Penilaian AHP pemilihan alternatif yang Paling Berpengaruh pada Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pemberian Bantuan Dana PUMP Terhadap Perekonomian Nelayan Menurut Kriteria Biaya



Gambar 6. Hasil penilaian AHP pemilihan prioritas alternatif Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pemberian Bantuan Dana PUMP Terhadap Perekonomian Nelayan

### **Pembahasan**

Menurut Naufal (2014), sumberdaya manusia di Pesisir Pantai Utara Aceh masih tergolong rendah, hal ini sesuai dengan hasil analisis AHP (Gambar 2) yang menunjukkan bahwa kriteria sumberdaya manusia merupakan kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan dengan skor 0,582. Hal ini menunjukkan permasalahan sumberdaya manusia bukanlah hal baru pada perikanan Aceh. Sumber daya manusia mencakup hal-hal seperti keterampilan, penilaian, dan kecerdasan (Barney, 1998). Oleh karena itu, faktor sumberdaya manusia memegang peranan paling penting dalam peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan, dengan meningkatnya mutu sumberdaya manusia di bidang perikanan dalam hal keterampilan, penilaian maupun kecerdasan maka produktivitas akan meningkat pula sehingga proses pemberian dana PUMP menjadi lebih efektif.

Kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan dapat dirumuskan dari hasil analisis AHP pada Gambar 2. Kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah mengutamakan peningkatan kapasitas tenaga pembimbing. Kebijakan ini dianggap paling tepat karena tenaga pembimbing merupakan faktor kunci peningkatan efektivitas pemberian dana PUMP. Pembimbing yang memiliki kemampuan diatas rata-rata bisa membimbing nelayan sehingga nelayan bisa menggunakan dana PUMP sebagaimana mestinya.



Prioritas kebijakan yang selanjutnya adalah pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan. Kebijakan ini dianggap penting melihat kondisi nelayan dan pengelola Kelompok Usaha Bersama yang belum mampu untuk mengelola keuangannya sendiri sehingga menyebabkan dana PUMP yang sudah dibagikan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

Sedangkan kebijakan pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan tidak diprioritaskan karena dengan meningkatnya kapasitas tenaga pembimbing, maka kapasitas manajemen pengelolaan keuangan nelayan juga akan meningkat, nelayan juga memiliki kesadaran penggunaan dana PUMP sebagaimana mestinya sehingga memudahkan pemantauan kegiatan pasca penyaluran dana PUMP. Dengan demikian kegiatan pemantauan akan tetap berjalan dengan baik.

### **Kesimpulan**

Kriteria yang paling mempengaruhi peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan adalah kriteria sumberdaya manusia, diikuti kriteria waktu dan kriteria SDM. Sedangkan prioritas kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana PUMP terhadap perekonomian nelayan berdasarkan hasil penilaian *Analytical Hierarchy Process (AHP)* menunjukkan peningkatan kapasitas tenaga pembimbing di urutan pertama, diikuti pelatihan manajemen pengelolaan keuangan nelayan dan pemantauan secara intensif kegiatan pasca penyaluran bantuan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih kepada Kemenristek Dikti yang telah mendanai penelitian ini pada skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2016.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik Banda Aceh. 2014. Aceh dalam angka tahun 2014. BPS Banda Aceh.
- Barney, J.B., P.M. Wright. 1998. On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. *Human Resource Management* (1986-1998), 37(1): 31.
- Chang, D.Y. 1996. Theory and methodology: Application of the extent analysis method on fuzzy AHP. *European Journal of Operational Research*, 95 (1996) 649-655.
- Herdiana, Y., I. Yulianto, S.J. Compbell. 2010. Membangun puing harapan. *Wildlife Conservation Society – Indonesian*.
- Kaleka, D.M.W., B.H. Iskandar, D.R. Monintja, M.S. Baskoro. 2007. Analisis pengembangan armada perikanan tangkap di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. *Buletin PSP*, 16(2):296-316.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan bidang perikanan tangkap Nomor KEP. 32/KEP-DJPT/2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Jakarta.
- Marimin. 2010. Teknik dan aplikasi pengambilan keputusan kriteria majemuk. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muchlisin, Z.A., M. Nazir, M. Musman. 2012a. Pemetaan potensi daerah untuk pengembangan kawasan minapolitan di beberapa lokasi dalam Provinsi Aceh: suatu kajian awal. *Depik*, 1(1): 68-77.
- Muchlisin, Z.A., N. Fadli, A. M. Nasution, R. Astuti, M. Marzuki. 2012b. Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Depik*, 1(2): 107-113.



- Muchlisin, Z.A., N. Fadli, A. M. Nasution, R. Astuti, Marzuki, D. Musni. 2012c. Analisis subsidi perikanan non BBM di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Depik*, 1(3): 175-182.
- Muchlisin, Z.A., N. Fadli, A.M. Nasution, R. Astuti. 2013. Catatan Penelitian: Persepsi nelayan terhadap kebijakan subsidi perikanan dan konservasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Depik*, 2(1): 33-39.
- Naufal, A. 2014. Analisis kebijakan pengelolaan optimal perikanan cakalang di pesisir utara Aceh. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nazir, M. 2009. Metode penelitian. Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Rukmayadi, D, Marimin. 2000. Seleksi produk kelapa prospektif dan analisis mutunya dengan pendekatan fuzzy. *J. II. Pert Indon.*, 9(2): 52-61.
- Saaty, T.L. 1988. *Mathematical models for Decission Support: What is the Analytic Hierarchy Process.*Nato Asi Series Springer-Verlag Berlin Heidelberg Vol. F48.
- Yeni, E., A. Naufal. 2017. Tingkat Efektivitas pemberian bantuan dana pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh. *Jurnal Bilih dan Konservasi*, 1: 9-11.

Received: 2 November 2017

Accepted: 4 December 2017

*How to cite this paper:*

Yeni, E., A. Naufal. 2018. Analisis kebijakan peningkatan efektivitas pemberian bantuan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada kelompok nelayan di Kota Banda Aceh. *Depik*, 7(1): 76-83.